



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
**INSPEKTORAT**

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN 2024**

*"Nasudhaira Kutumbakam"*



## Kata Pengantar



*Rencana Kerja Inspektorat Kota Denpasar merupakan media utama yang menuangkan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.*

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa setiap OPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Denpasar. Rencana Kerja Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2024 ini disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024 pada Inspektorat Kota Denpasar, dan kami berharap penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat berguna bagi peningkatan kinerja dan nantinya dapat direalisasikan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Denpasar.

Denpasar, 7 Agustus 2023

Inspektur Kota Denpasar



**Ir. Putu Naning Djyaningsih, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650726 199201 2 001



## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
Gambar 1. Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	2
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2022.....	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu & Capaian Renstra Inspektorat Kota Denpasar .....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Denpasar .....	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	20
2.3.1 Kegiatan-kegiatan di Tahun 2022 Sesuai Tupoksi Inspektorat Kota Denpasar.....	20
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan dalam Pelayanan .....	32
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	33
BAB III Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Denpasar .....	42
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	42
3.2. Tujuan & Sasaran Renja Inspektorat Kota Denpasar .....	43
3.3. Program dan Kegiatan .....	46
BAB IV Renja dan Pendanaan Inspektorat Kota Denpasar TA 2024 .....	47
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	47
BAB V .....	56
Penutup.....	56



## Daftar Gambar

Gambar 1.1 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	2
Gambar 2.1 Penerimaan Piagam Penghargaan Kapabilitas APIP Level 3.....	23
Gambar 2.2 Penyerahan hasil Evaluasi SAKIP Kota Denpasar .....	24
Gambar 2.4 Penyerahan Piagam Penghargaan Opini WTP dari BPK RI.....	27
Gambar 2.5 Potret Hasil Tindak Lanjut Hasil Temuan Tahun 2022 .....	32



## Daftar Tabel

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Denpasar dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022 .....	12
Tabel 2.2 Analisis Capaian Indikator Sasaran terhadap Target .....	18
Tabel 2.3 Indikator Keberhasilan Penilaian APIP .....	21
Tabel 2.4 Indikator Keberhasilan Laporan Keuangan Yang Efektif .....	23
Tabel 2.5 Rincian Komponen Penilaian SPIP terintegrasi.....	30
Tabel 2.6 Indikator Keberhasilan Tindak Lanjut Hasil Temuan .....	31
Tabel 2.7 Review terhadap RKPD Tahun 2024 .....	35
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Denpasar .....	44
Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2024 .....	45
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 .....	51



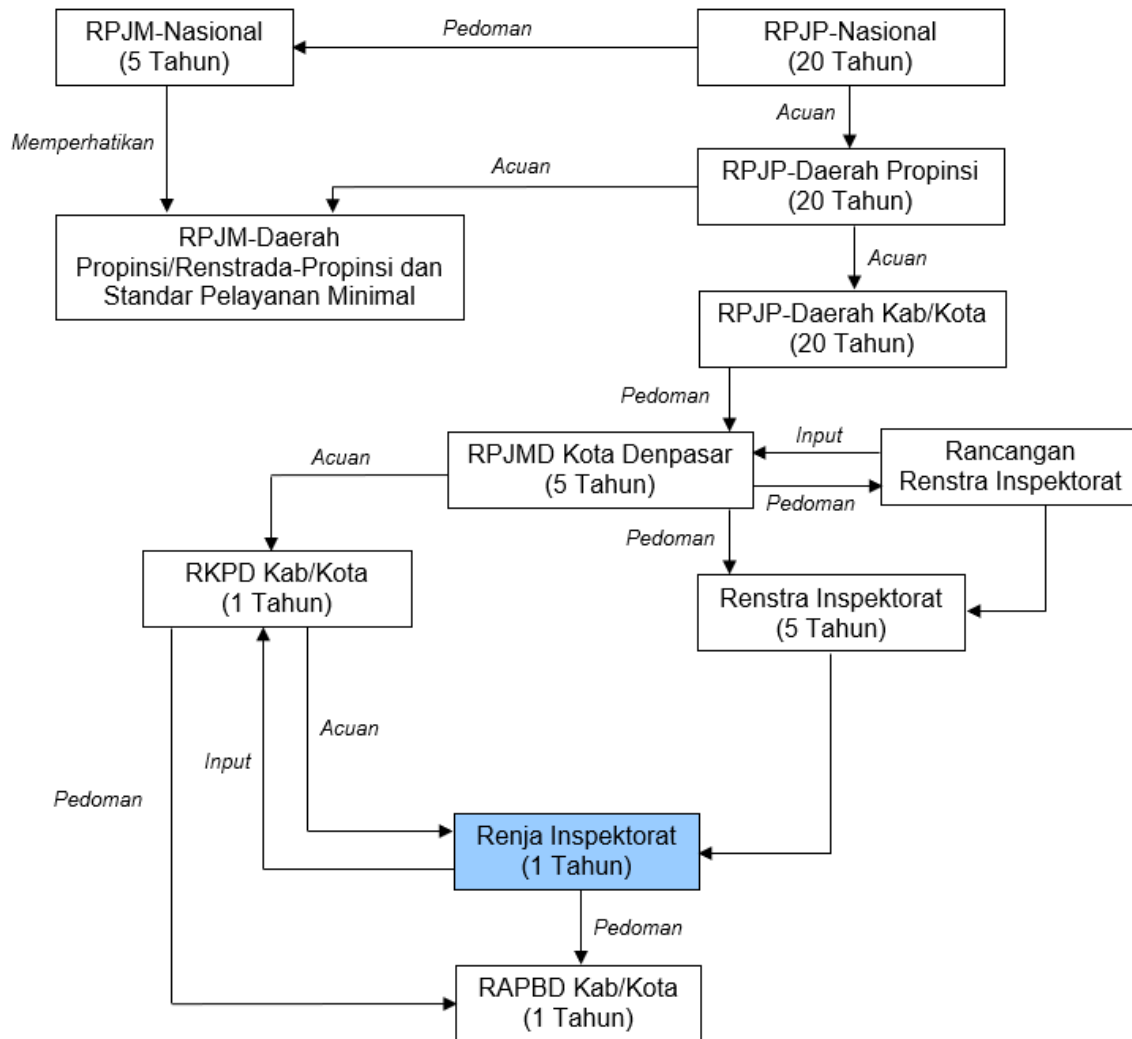
## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Renja merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, untuk mengoperasionalkan RKPD dan berupaya mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dapat disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1.1 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Renja Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kota Denpasar. Visi pembangunan Kota Denpasar sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu: **“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”**. Visi ini secara filosofis dilandasi oleh filsafat Tri Hita Karana, yaitu harmoni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Kerangka filosofis ini diadopsi dan diadaptasi menjadi kerangka dasar.



Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar No. 19 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat dan Badan Daerah, Inspektorat Kota Denpasar mempunyai uraian tugas dalam menyelenggarakan fungsi meliputi:

1. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk peningkatan kinerja pemerintahan;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan dan penilaian sistem pengendalian intern pemerintahan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. Mengoordinasikan dan memastikan penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi, *supervise* dan pencegahan korupsi dan penegakan integritas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*);
6. Mengoordinasikan pengawasan atas pelaksanaan program reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan SAKIP dan LKJiP Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.



Untuk menjalankan fungsi di atas, Inspektorat Kota Denpasar menyusun dokumen Rencana Kerja yang mengacu pada misi ke tiga Pemerintah Kota Denpasar yaitu **“Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)”**.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas Inspektorat Kota Denpasar menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2024.

## 1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat merupakan pedoman pelaksanaan program kerja / kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang disusun berdasarkan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi



Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56);
22. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah;
23. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah; dan



24. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat dan Badan Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari rencana strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2021 – 2026 serta untuk memberikan gambaran yang jelas tentang, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Inspektorat Kota Denpasar.

Tujuan Penyusunan Renja Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pengawasan pemerintah daerah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.



- b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- c. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan organisasi dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*), tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa-analisa kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok, namun besarannya berbeda.



### BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- a. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Perangkat Daerah.
- b. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Organisasi
- c. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut



## BAB II

### Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2022

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu & Capaian Renstra Inspektorat Kota Denpasar

Secara umum Inspektorat Kota Denpasar melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021 – 2026, dimana tahun 2021 merupakan tahun awal dari masa berlaku Renstra 2021 – 2026, yang sekaligus merupakan dukungan terhadap pencapaian target – target RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahunan 2024 diawali dengan melaksanakan evaluasi tingkat capaian pelaksanaan Renja Tahun 2022. Untuk menunjang indikator utama tersebut, dilaksanakan berupa program kegiatan utama. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan pengawasan dalam situasi pemulihan ekonomi yang masih menjadi tantangan bagi Inspektorat untuk tetap mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja. Adapun strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada kegiatan yang memiliki daya ungkit besar terhadap capaian sasaran
2. Memaksimalkan penggunaan TIK dengan melaksanakan pemeriksaan melalui daring (*online*)

Berikut adalah hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Denpasar dan pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022.



**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Denpasar dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	
6	INSPEKTORAT										
6	01	URUSAN INSPEKTORAT DAERAH									
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Pengawasan	100	100	100	100	100	100	
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	80
		01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang/bulan	50 orang/bulan	50 orang/bulan	100	80 orang/bulan	100
		02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasi Penyediaan Administrasi Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	40
6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan	100	80	80	80	80	80
		09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang/tahun	50 orang/tahun	50 orang/tahun	100	50 orang/tahun	100
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	100	100	80



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
								Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	40
			02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	40
			03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	40
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	4 Paket	40
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	40
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	8 Dokumen	40
			08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	8 Laporan	40
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	-	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	5 Laporan	25
6	01	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>80</b>
			10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100	20 Unit	35 Unit	58



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
								Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
6	01	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100	100	100	100	100	100	100	80
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	40
			03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	40
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	40
6	01	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100	100	100	100	100	100	100	80
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit/tahun	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit/tahun	32 unit	32 unit	32 unit	100	32 unit	32 unit	100
			11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	10 Unit	40



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan		
								Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	
6	01	02		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan Ikhtisar	-	-	-	-	1 Laporan	-	0	
				02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan Ikhtisar	-	-	-	-	1 Laporan	-	0	
				03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan Ikhtisar	-	-	-	-	1 Laporan	-	0	
				04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Laporan Ikhtisar	-	-	-	-	1 Laporan	-	0	
				05 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	5 Laporan Ikhtisar	-	-	-	-	1 Laporan	-	0	
				06 Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	5 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100	1 Kesepakatan	2 Kesepakatan	40	
				07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	8 Dokumen	40	
6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	100	100	100	100	100	100	100	100	
				01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	Jumlah laporan Penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang ditangani	5 Laporan Ikhtisar	-	-	-	-	1 Laporan	-	0	



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
								Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2023)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
			02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan Ikhtisar	1 Laporan Ikhtisar	1 Laporan Ikhtisar	1 Laporan Ikhtisar	100	1 Laporan Ikhtisar	2 Laporan Ikhtisar	40
6	01	03		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan kegiatan yang bersifat <i>consulting</i> (konsultasi)	100	100	100	100	100	100	100	100
6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Cakupan kegiatan Pengawasan dan Fasilitas	100	100	100	100	100	100	100	100
			01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	10 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100	2 Rekomendasi	4 Rekomendasi	40
			02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun	10 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100	2 Rekomendasi	4 Rekomendasi	40
6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100	100	100	100	100	100	100	100
			01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah/tahun	-	-	-	-	38 Perangkat Daerah	-	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah/tahun	-	-	-	38 Perangkat Daerah	-	0
	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	38 perangkat daerah/tahun	-	-	-	38 Perangkat Daerah	-	0
	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 perangkat daerah/tahun	-	-	-	38 Perangkat Daerah	-	0



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Denpasar

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Walikota Denpasar berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Inspektorat Kota Denpasar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mencapai tujuan yang di tetapkan Inspektorat merancang 1 (satu) sasaran, 3 (tiga) indikator, serta analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan beserta Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2.2 Analisis Capaian Indikator pada masing-masing Sasaran terhadap Target**

NO	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA CAPAIAN 2023
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Kapabilitas APIP	LEVEL 3
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	LEVEL 3
		Persentase OPD yang didampingi/yang mendapat pendampingan	60%

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu :



a. Faktor Pendorong :

- Mekanisme kerja Inspektorat Kota Denpasar yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
- Jumlah Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang cukup memadai
- Sarana dan prasarana cukup memadai
- Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat
- Adanya komitmen pimpinan dan APIP dalam meningkatkan kapabilitas APIP
- Adanya kerjasama yang baik dari Perangkat Daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.

b. Faktor Penghambat :

- Belum optimalnya kompetensi APIP
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan Perangkat Daerah masih belum optimal.
- Keterbatasan proyeksi anggaran pendapatan dalam APBD Kota Denpasar.



### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Dari evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022, dan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat di rumuskan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berpengaruh terhadap kualitas temuan
2. Belum efektifnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
4. Pelaksanaan audit belum sepenuhnya berbasis risiko
5. Adanya tuntutan meningkatkan peran APIP, selain berperan sebagai *quality assurance* (penjamin mutu) dan *consulting* (memberikan konsultasi dan pendampingan), juga berfungsi dalam pencegahan korupsi (sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2019)

Isu – isu penting tersebut diatas, sangat strategis untuk segera ditangani dengan penyusunan program kegiatan yang mampu mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam renstra.

#### 2.3.1 Kegiatan-kegiatan di Tahun 2022 Sesuai Tupoksi Inspektorat Kota Denpasar

Hasil kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat Kota Denpasar pada Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **Meningkatkan kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)**

Untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Denpasar menargetkan penilaian Kapabilitas (Kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga



unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM) Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan jumlah Sumber Daya Manusia yang bersertifikat semakin meningkat dapat dilihat pada Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya pada tabel 3.

**Tabel 2.3 Indikator Keberhasilan Penilaian APIP**

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
2.	SDM Yang bersertifikat	100%	100%	100%

Tahun 2022 Penilaian Kapabilitas APIP untuk Inspektorat Kota Denpasar sudah memenuhi data pendukung pencapaian target yaitu Level 3 dimana dari 6 Elemen yang dinilai telah terpenuhi antara lain :

a. Peran dan Layanan APIP

APIP melakukan audit kepatuhan atas area, proses atau sistem tertentu terhadap peraturan (kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan, kontrak atau kriteria lain yang mengatur pelaksanaan area, proses atau sistem yang menjadi ruang lingkup audit).

b. Manajemen Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh auditor yang memiliki kompetensi yang relevan.

c. Praktik Profesional

Adanya rencana pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan jasa lainnya) secara periodik (tahun dan



beberapa tahun) berdasarkan hasil konsultasi dengan manajemen dan atau pemangku kepentingan.

d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pengawasan yang mencakup seluruh sumberdaya yang dibutuhkan. Adanya anggaran operasional kegiatan pengawasan

e. Budaya dan Hubungan Organisasi

APIP fokus pada pembinaan dan membenahan hubungan infrastruktur di dalam lingkungan internalnya sendiri, yang mencakup struktur organisasi, manajemen SDM, menyusun dan pemantauan anggaran, rencana tahunan, pemenuhan prangkat dan teknologi pengawasan intern dan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern itu sendiri.

f. Struktur Tata Kelola

APIP telah membangun hubungan pelaporan (laporan kegiatan dan laporan administrasi) secara formal di lingkungannya, serta yang lainnya yang sangat mendukung peningkatan Kapabilitas APIP.

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Inspektorat dalam hal ini APIP, dilaksanakan diklat/kursus/pelatihan yang mengacu pada jadwal BPKP dan juga instansi lain. Dari 80% yang ditargetkan SDM yang bersertifikat, telah banyak diklat /kursus/pelatihan/ diikuti oleh staf untuk menambah ilmu serta untuk mendapatkan sertifikat, sehingga terealisasi 100%.



Sumber: <https://www.bkp.go.id/berita/read/33933/13326/Kapabilitas-APIP-Kota-Denpasar-Capai-Level-3>

**Gambar 2.1 Penerimaan Piagam Penghargaan Kapabilitas APIP Level 3**

### **Terwujudnya Laporan Keuangan yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar**

Untuk pencapaian sasaran Terwujudnya laporan keuangan yang efektif di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 2.4 Indikator Keberhasilan Laporan Keuangan Yang Efektif**

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot (2021)	A	BB	90%
2	- Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan predikat B keatas	35 OPD	35 OPD	100%
3	- Opini BPK	WTP	WTP	100%



Untuk mencapai sasaran Terwujudnya Laporan Keuangan yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Inspektorat Kota Denpasar menargetkan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Denpasar dari Kementerian PAN dan RB dengan kategori A.

Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Pada bulan September Tahun 2022 (Gambar 3) telah diumumkan bahwa Kota Denpasar memperoleh kategori BB dengan nilai 74,57. Hasil ini sudah meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan katagori BB dengan nilai 73,33 pada evaluasi Akuntabilitas Tahun 2020.



Sumber: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/rata-rata-nilai-sakip-rb-meningkat-bukti-keseriusan-reformasi-birokrasi>

**Gambar 2.2 Penyerahan hasil Evaluasi SAKIP Kota Denpasar**



Target ini tercapai karena Penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yang disajikan oleh Pemerintah Kota Denpasar telah terlaksana sesuai yang diharapkan. Adapun komponen yang dievaluasi adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Perencanaan Strategis yang terdiri dari Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra, Implementasi Renstra.
- 2) Perencanaan Kinerja Tahunan yang terdiri dari Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan, Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan.

b. Pengukuran Kinerja

Komponen yang dievaluasi adalah Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran

c. Pelaporan Kinerja

Komponen yang dievaluasi adalah Pelaporan Kinerja yang terdiri dari Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja.

d. Evaluasi Kinerja

Komponen yang dievaluasi adalah Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi dan Pemanfaatan Evaluasi.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Komponen yang dievaluasi adalah Kinerja yang Dilaporkan meliputi Kinerja yang dilaporkan (*Output*), Kinerja yang dilaporkan (*Outcome*).

Didalam penyusunan LKjIP Pemerintah Kota Denpasar, tentunya ditunjang oleh LKjIP dari Organisasi Perangkat Daerah, dimana LKjIP / SAKIP masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dievaluasi oleh Inspektorat Kota Denpasar untuk mengukur



pencapaian sasaran / kinerja organisasi tersebut. Pada Tahun 2022 dari 35 OPD yang ada, ditargetkan sebesar 35 OPD dengan predikat B keatas pada Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan pada Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja. Untuk tahun 2021 Jumlah OPD dengan predikat CC keatas dari 33 OPD yang ditargetkan sudah 35 OPD yang nilai LAKIP nya mencapai CC keatas sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %. Capaian ini sudah memenuhi target.

Untuk mencapai sasaran terselenggaranya akuntansi pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Inspektorat Kota Denpasar menargetkan opini WTP oleh BPK – RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021.

Dari hasil pemeriksaan BPK - RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 BPK – RI memberikan opini WTP. Sehingga realisasi capaiannya pada tahun 2022 sebesar 100%. Opini ini bisa diraih karena Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan secara umum sebagai berikut :

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis Akrual.
- b. Kecukupan pengungkapan didalam Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- c. BUMD non PDAM efektif dan efisien dalam memberikan kontribusi terhadap Pemda.
- d. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan.



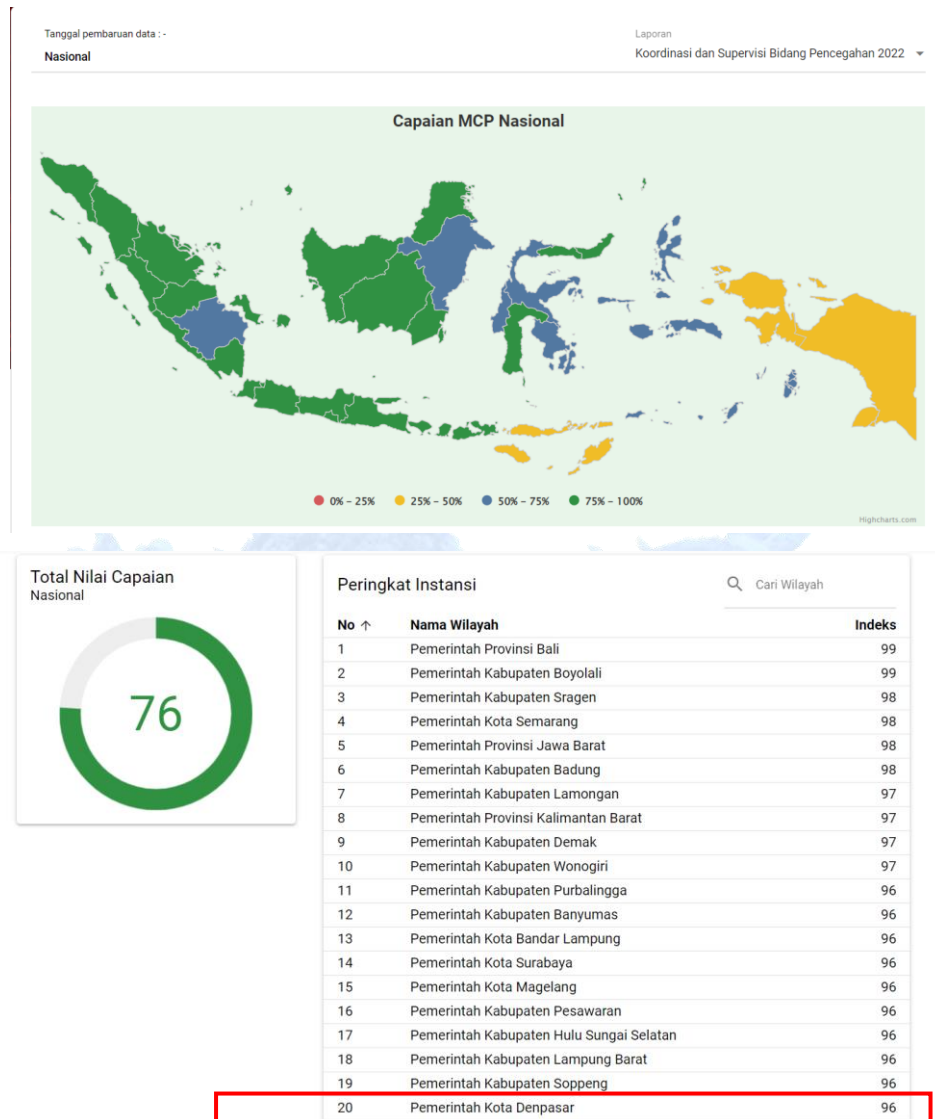
- e. Dalam Pelaksanaan pengelolaan anggaran, tidak terjadi penyimpangan – penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negara.
- f. Semua tindak lanjut, termasuk tahun – tahun sebelumnya, yang telah direkomendasikan oleh BPK telah dilaksanakan.



Sumber: <https://www.setda.denpasarkota.go.id/berita/sukses-pertahankan-opini-wtp-10-kali-berturut-pemkot-denpasar-raih-penghargaan-dari-kementrian-keuangan-ri>

### **Gambar 2.3 Penyerahan Piagam Penghargaan Opini WTP dari BPK RI**

Selanjutnya guna mendukung proses pencapaian sasaran Terwujudnya Laporan Keuangan yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Inspektorat Kota Denpasar juga menargetkan peningkatan nilai capaian MCP (*Monitoring Center For Prevention*) tahun 2022 dan nilai capaian SPIP Terintegrasi tahun 2022.



Sumber: <https://jaga.id/>

## Gambar 2.4 Data Rekapitulasi Capaian MCP Tahun 2022

MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi. Area intervensinya meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, manajemen



aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. MCP mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Tahun 2022 Pemkot Denpasar menduduki peringkat dua puluh nasional dari seluruh pemerintah daerah se-Indonesia, dengan nilai capaian 95,93. persen. Hal tersebut tertuang dalam Data Rekapitulasi Capaian MCP Tahun 2022 yang dirilis KPK RI seperti terlihat pada gambar 5 di atas.

Pemerintah Kota Denpasar akan terus meningkatkan capaian MCP di 8 area intervensi di tahun berikutnya, dan juga melakukan berbagai terobosan ataupun inovasi untuk mempersempit celah untuk melakukan tindakan korupsi, salah satunya dengan melakukan pengalihan sistem dari sistem manual ke digitalisasi.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) selalu mengalami pengembangan untuk dapat adaptif dengan perubahan zaman. Penyelenggaraan SPIP ini didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat dilakukan penilaian secara mandiri atas implementasi SPIP Terintegrasi yang meliputi penilaian atas kualitas perencanaan, penilaian struktur dan proses (atas lima unsur SPIP), dan penilaian capaian empat tujuan SPIP. Penilaian atas SPIP ini telah diintegrasikan juga dengan penilaian atas maturitas manajemen



risiko, indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK), dan penilaian kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah.

Nilai Capaian SPIP terintegrasi tahun 2022 tertuang dalam Laporan Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kota Denpasar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor: PE.09.03/LHP-954/PW22/3/2022 tanggal 12 Desember 2022. Pemerintah Kota Denpasar memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,359 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,106 serta skor IEPK sebesar 2,856, seperti terlihat pada tabel 5.

**Tabel 2.5 Rincian Komponen Penilaian SPIP terintegrasi**

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi Perwakilan	Naik/ Turun
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,070	3,359	(0,711)
2.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,800	3,106	(0,690)
3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,000	2,856	(0,150)

Dalam laporan tersebut juga disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menetapkan dan menjabarkan kinerja sampai pada tingkat OPD dan Individu;
2. Menetapkan sasaran strategis yang spesifik dan relevan dengan sasaran strategis pemerintah daerah dengan indikator dan target kinerja yang tepat dan sesuai dengan target di atasnya serta didukung dengan data yang handal;
3. Membangun mekanisme monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja serta rencana aksi secara berkala dan dimanfaatkan dalam pemberian penghargaan dan sanksi;



4. Membangun mekanisme pemantauan agar dapat dipastikan efektivitas dan efisiensi anggaran yang digunakan untuk membiayai hasil atau *outcome* yang ingin dicapai
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan sehingga sesuai dengan indikator penilaian:
  - a. Sasaran strategis (tingkat pemda dan stker) dan indikator kinerja yang tepat serta didukung dengan data yang handal
  - b. Sasaran Program terkait sasaran strategis OPD
  - c. Target kinerja program memperhatikan target di atasnya

**Meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan**

Dalam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, khususnya pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan juga Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI Perwakilan Provinsi Bali

Pada Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pada Inspektorat Kota Denpasar Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 2.6 Indikator Keberhasilan Tindak Lanjut Hasil Temuan**

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas	90%	85,53%	95%



Untuk mencapai sasaran meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kota Denpasar menargetkan Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas sebesar 90%. Untuk tahun anggaran 2022 jumlah temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh OPD yang menjadi Obyek Pemeriksaan dengan prosentase capaiannya sebesar 85.53% dari yang ditargetkan sebesar 90% (detail pada gambar 6). Hal ini terjadi karena penyelesaian tindak lanjut temuan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh obrik, kesulitan dalam melengkapi data pendukung, mengalami keterlambatan dan sering tidak tepat waktu.



Gambar 2.5 Potret Hasil Tindak Lanjut Hasil Temuan Tahun 2022

### 2.3.2 Permasalahan dan Hambatan dalam Pelayanan

Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021-2026.



Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Inspektorat Kota Denpasar dalam pelaksanaan tugas serta wewenang nya adalah :

1. Kompetensi aparat pengawasan yang belum memadai
2. Respon OPD dalam melaksanakan aturan tentang pengelolaan keuangan daerah belum memadai.
3. Komitmen OPD dalam pelaksanaan waskat belum seperti yang diharapkan.
4. Ada beberapa temuan BPK yang belum dapat ditindaklanjuti karena pegawai yang bersangkutan sudah pensiun dan meninggal dunia

Selain itu, hambatan yang terjadi di Inspektorat Kota Denpasar ketika melakukan tugas serta wewenang nya adalah :

1. Penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan (obrik) dan bahkan sering tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan
2. Untuk efektifnya pengawasan bantuan informasi masyarakat sangat dibutuhkan, karena kurangnya bantuan informasi dari masyarakat, terutama ketika pada tahap pembuktian.
3. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengawasan.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Penyusunan Renja Inspektorat Kota Denpasar menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Kota Denpasar. Saat penyusunan Renja ini, program dan kegiatan yang diusulkan untuk tahun 2024 direncanakan dengan asumsi keadaan normal ketika pandemi Covid dinyatakan berakhir. Untuk Tahun 2024, terdapat 3 program, 10 kegiatan, dan 33 sub kegiatan. Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi menjadi program



prioritas, sementara Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota merupakan program yang berisikan kegiatan/sub kegiatan rutin untuk menunjang operasional kantor di Inspektorat Kota Denpasar. Pagu dana tahun 2024 yang diusulkan sebesar Rp. 22.701.326.082,- dengan rincian pada tabel berikut ini:





**Tabel 2.7 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Capaian Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6					Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				22.713.517.365	INSPEKTORAT DAERAH				22.701.326.082	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	21.841.944.745	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	21.651.615.082	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	17.250.509.802	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	17.149.880.702	
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 orang/bulan	17.247.434.802	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 orang/bulan	17.146.880.702	
				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.075.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.000.000	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	1.016.632.541	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	1.266.542.000	
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Inspektorat	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai Tugas dan Fungsinya	1 Tahun	1.016.632.541	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Inspektorat	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai Tugas dan Fungsinya	81 orang	1.266.542.000	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum	100%	813.005.926	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum	100%	787.978.500	



KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Capaian Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			perangkat daerah					perangkat daerah			
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	14.939.814	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	14.931.000
	02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	163.549.346	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantotr	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	153.579.500
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1 paket	32.568.148	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1 paket	35.558.000
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	123.730.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	123.730.600
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	109.321.828	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	105.150.000
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	36.531.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	31.320.000
	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Inspektorat	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	162.975.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Inspektorat	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	156.000.000
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Bali dan Luar Provinsi Bali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	169.440.191	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Bali dan Luar Provinsi Bali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	167.710.000



KODE				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Capaian Penting
				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	682.148.511	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	141.767.800	
			10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	682.148.511	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 unit	141.767.800	
6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.345.823.840	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.615.490.080	
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	140.220.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	186.000.000	
			03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	45.643.250	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	99.070.000	
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.159.960.590	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.330.420.080	
6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Cakupan layanan pemeliharaan barang	100%	733.774.126	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Cakupan layanan pemeliharaan barang	100%	689.956.000	



KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Capaian Penting		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	Pemerintahan Daerah		milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			Pemerintahan Daerah		milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	32.492.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	31.700.000		
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	361.317.469	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	371.516.000		
	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	339.964.157	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	286.740.000		
6	01	02		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>		<b>Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)</b>	100%	<b>344.483.430</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>		<b>Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)</b>	100%	<b>438.938.000</b>
6	01	02	2.01	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>		<b>Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal</b>	100%	<b>212.884.185</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>		<b>Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal</b>	100%	<b>317.552.500</b>
	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 laporan	17.060.778	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 laporan	144.528.500		



KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Capaian Penting		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 laporan	22.056.674	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 laporan	61.734.500		
	03	Reviu Laporan Kinerja	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 laporan	21.319.759	Reviu Laporan Kinerja	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 laporan	14.931.000		
	04	Reviu Laporan Keuangan	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	18.170.078	Reviu Laporan Keuangan	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	43.098.000		
	05	Pengawasan Desa	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 laporan	17.268.071	Pengawasan Desa	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 laporan	20.432.500		
	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 laporan	79.290.697	Kerjasama Pengawasan Internal	Kota Denpasar	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 kesepakatan	-		
	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 dokumen	37.718.128	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 dokumen	32.798.000		
6	01	02	2.02	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>		<b>Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu</b>	<b>100%</b>	<b>131.599.245</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>		<b>Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu</b>	<b>100%</b>	<b>121.415.500</b>
	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Laporan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	1 laporan	17.887.189	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Laporan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	1 laporan	14.668.000		



KODE				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Capaian Penting
				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 laporan	113.712.056	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 laporan	106.747.500	
6	01	03		<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		<b>Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi)</b>	<b>100%</b>	<b>527.089.191</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		<b>Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi)</b>	<b>100%</b>	<b>610.773.000</b>	
6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	100%	31.983.414	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	100%	46.711.000	
			01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Denpasar	Jumlah rekomendasi kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	2 Rekomendasi	11.398.874	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Denpasar	Jumlah rekomendasi kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	2 Rekomendasi	8.194.000	
			02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kota Denpasar	Jumlah rekomendasi kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun	2 rekomendasi	20.584.540	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kota Denpasar	Jumlah rekomendasi kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun	2 rekomendasi	38.517.000	
6	01	03	2.02	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>		<b>Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi</b>	<b>100%</b>	<b>495.105.777</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>		<b>Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi</b>	<b>100%</b>	<b>564.062.000</b>	
			01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah	31.440.579	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah	28.352.000	



KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Capaian Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Denpasar	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah	24.370.769	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Denpasar	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah	48.190.000	
03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Denpasar	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 kegiatan	409.885.017	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Denpasar	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 kegiatan	371.655.000	
04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Denpasar	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 perangkat daerah	29.409.412	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Denpasar	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 perangkat daerah	115.865.000	



## BAB III

### Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Denpasar

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategi Inspektorat Kota Denpasar disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar, seperti diamanatkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sisten Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan Implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Secara singkat disampaikan Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah **“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU”** penjabaran lebih kongkrit visi pembangunan dimaksud kedalam misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana



5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Mengacu pada misi 3, maka Inspektorat Kota Denpasar menetapkan tujuan dan sasaran, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar.

### 3.2. Tujuan & Sasaran Renja Inspektorat Kota Denpasar

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah, dalam melaksanakan fungsinya membantu Kepala Daerah untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perangkat daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat mengampu misi ke 3 (Tiga) yaitu: **“Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)”**.

Sedangkan yang dimaksud dengan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai.

Sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai kinerja/tujuan/sasaran seperti yang telah diuraikan pada rencana strategis tahun 2021-2026 disusunlah suatu perjanjian kinerja tahun 2022 yang harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan anggaran. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja



dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan OPD yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Perjanjian kinerja ini merupakan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Penetapan kinerja yang dibuat awal tahun 2022 telah ditetapkan dalam DPA tahun 2022 antara Inspektur dengan Walikota, antara Inspektur dengan Sekretaris dan Inspektur Pembantu, serta antara Sekretaris dengan kepala subbagian di Sekretariat. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah yang tertuang pada indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 8.

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Denpasar**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4				
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1. Kapabilitas APIP  2. Maturitas SPIP  3. Persentase OPD yang di damping / yang mendapat pendampingan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			50%	60%	70%	80%	90%



Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Dalam hal ini Sasaran Program dan Kegiatan yang akan dicapai oleh Inspektorat dapat diuraikan seperti di bawah ini :

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal
2. Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP Kota Denpasar
4. Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja OPD

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran untuk memenuhi misi sangat didukung oleh adanya dokumen-dokumen yang saling berkaitan, selaras dan berkesinambungan sehingga memudahkan dalam melaksanakan pengukuran terhadap kinerja atau manfaat yang diinginkan dalam program.

**Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2	Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Persepsi Korupsi
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP Kota Denpasar	Level Kapabilitas APIP
4	Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja OPD	Persentase OPD yang didampingi/yang mendapat pendampingan



### 3.3. Program dan Kegiatan

Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024 disusun dengan asumsi bahwa pandemi COVID-19 telah berakhir. Sehingga, beberapa kegiatan yang dirancang dengan keadaan normal. Usulan pagu dana kegiatan tahun 2024 sebesar Rp. 22.701.326.082,- dengan jumlah Kegiatan sebanyak 10 dan sub kegiatan sebanyak 33. Diharapkan dengan asumsi keadaan sudah normal, sehingga pemasukan untuk pendapatan daerah juga kembali normal yang berarti pagu yang dialokasikan tidak difocusing lagi. Hal ini bisa menambah anggaran lebih terfokus kepada peningkatan kompetensi sesuai Rencana Aksi Walikota tahun 2021-2026.





## BAB IV

# Renja dan Pendanaan Inspektorat Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024

### 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Denpasar telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk perencanaan pembangunan dan keuangan Tahun 2024.

Perencanaan pembangunan Kabupaten/ kota dikelompokkan ke dalam : 1) Urusan Pemerintahan, 2) Bidang Urusan, 3) Program, 4) Kegiatan dan 5) Sub Kegiatan. Yang dimaksud dengan program adalah sub urusan dan prioritas nasional, kegiatan adalah kewenangan sedangkan sub kegiatan adalah aktivitas/ layanan. Pemetaan (*Mapping*) organisasi menyajikan alternatif-alternatif perumpunan organisasi berdasarkan kondisi di pemerintah daerah kabupaten/ kota. Klasifikasi dan kodefikasi organisasi bersifat baku yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur-unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan nomenklatur organisasi menyesuaikan perumpunan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Inspektorat mengampu kodefikasi unsur pengawas urusan pemerintahan dan memiliki 2 (dua) program utama yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat kesekretariatan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota.



Program, kegiatan dan sub kegiatan disusun dalam rangka pencapaian sasaran yang diukur dalam indikator sasaran. Ada pun program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun di Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian sasaran adalah :

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya



- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2) Program Penyelenggaraan Pengawasan**

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
  - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
  - c. Reviu Laporan Kinerja
  - d. Reviu Laporan Keuangan



- e. Pengawasan Desa
  - f. Kerjasama Pengawasan Internal
  - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  - b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

**3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

- 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
  - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- 2. Pendampingan dan Asistensi
  - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
  - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
  - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas



**Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6				Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
6	01			INSPEKTORAT DAERAH			22.701.326.082				23.537.082.334
6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan		100%	21.651.615.082		100%	22.724.993.363
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	17.149.880.702		100%	17.681.772.547
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	81 orang/bulan	17.146.880.702	DAU dan APBD Kota Denpasar	81 orang/bulan	17.678.620.672
			02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat	1 Dokumen	3.000.000	APBD Kota Denpasar	1 Dokumen	3.151.875
6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	1.266.542.000		100%	1.042.048.354
			09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat	81 orang	1.266.542.000	APBD Kota Denpasar	1 Tahun	1.042.048.354
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	787.978.500		100%	1.170.382.324
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	1 Paket	14.931.000	APBD Kota Denpasar	1 Paket	15.313.309
			02	Penyediaan Peralatan dan Perekengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Inspektorat	1 Paket	153.579.500	APBD Kota Denpasar	1 Paket	167.638.080
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Inspektorat	1 Paket	35.558.000	APBD Kota Denpasar	1 Paket	33.382.352



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Inspektorat	2 Paket	123.730.000	APBD Kota Denpasar	2 Paket	126.823.864
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat	1 Paket	105.150.000	APBD Kota Denpasar	1 Paket	112.054.874
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Inspektorat	4 Dokumen	31.320.000	APBD Kota Denpasar	4 Dokumen	374.444.275
			08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat	4 Laporan	156.000.000	APBD Kota Denpasar	4 Laporan	167.049.375
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Bali dan Luar Provinsi Bali	1 Laporan	167.710.000	APBD Kota Denpasar	1 Laporan	173.676.195
6	01	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>141.767.800</b>		<b>100%</b>	<b>699.202.223</b>
			10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Inspektorat	35 Unit	141.767.800	APBD Kota Denpasar	1 Tahun	699.202.223
6	01	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>1.615.490.080</b>		<b>100%</b>	<b>1.379.469.435</b>
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspektorat	1 Laporan	186.000.000	APBD Kota Denpasar	1 Laporan	143.725.500
			03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat	1 Laporan	99.070.000	APBD Kota Denpasar	1 Laporan	46.784.331



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat	1 Laporan	1.330.420.080	APBD Kota Denpasar	1 Laporan	1.188.959.604
6	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>689.956.000</b>		<b>100%</b>	<b>752.118.480</b>
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Inspektorat	1 Unit	31.700.000	APBD Kota Denpasar	1 Unit	33.304.813
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Inspektorat	30 Unit	371.516.000	APBD Kota Denpasar	32 Unit	370.350.406
				11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Inspektorat	5 Unit	286.740.000	APBD Kota Denpasar	5 Unit	348.463.261
6	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Kapabilitas APIP; Maturitas SPIP</b>		<b>Level 3 ; Level 3</b>	<b>438.938.000</b>		<b>100%</b>	<b>271.822.551</b>
6	01	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>		<b>100%</b>	<b>317.522.500</b>		<b>100%</b>	<b>136.933.325</b>
				01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Denpasar	1 Laporan	144.528.500	APBD Kota Denpasar	1 Laporan	17.487.297
				02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar	1 Laporan	61.734.500	APBD Kota Denpasar	1 Laporan	22.608.090
				03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kota Denpasar	1 Laporan	14.931.000	APBD Kota Denpasar	1 Laporan	21.852.753
				04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kota Denpasar	1 Laporan	43.098.000	APBD Kota Denpasar	1 Laporan	18.624.330
				05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Kota	1 Laporan	20.432.500	APBD Kota Denpasar	1 Laporan	17.699.773



KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
						Desa	Denpasar					
				07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Denpasar	4 Dokumen	32.798.000	APBD Kota Denpasar	4 dokumen	38.661.082
6	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>		100%	121.415.500		100%	134.889.226
				01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Kota Denpasar	1 Laporan	14.668.000	APBD Kota Denpasar	1 Laporan	18.334.369
				02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Denpasar	8 Laporan	106.747.500	APBD Kota Denpasar	8 Laporan	116.554.857
6	01	03			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase OPD yang didampingi / yang mendapat pendampingan</b>		70%	610.773.000		100%	540.266.420
6	01	03	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>	<b>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>		100%	46.711.000		100%	32.782.999
				01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Kota Denpasar	2 Rekomendasi	8.194.000	APBD Kota Denpasar	2 Rekomendasi	11.683.846
				02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun	Kota Denpasar	2 Rekomendasi	38.517.000	APBD Kota Denpasar	2 Rekomendasi	21.099.153
6	01	03	2.02		<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase Pendampingan dan Asistensi</b>		100%	564.062.000		100%	507.483.421
				01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	38 Perangkat Daerah	28.352.000	APBD Kota Denpasar	38 Perangkat Daerah	32.226.594



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Denpasar	38 Perangkat Daerah	48.190.000	APBD Kota Denpasar	38 Perangkat Daerah	24.980.038
03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Denpasar	4 Kegiatan	371.655.000	APBD Kota Denpasar	4 Kegiatan	420.132.142
04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Denpasar	38 Perangkat Daerah	115.865.000	APBD Kota Denpasar	38 Perangkat Daerah	30.144.647



## BAB V

### Penutup

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Denpasar merupakan implementasi dari Rencana Strategis Inspektorat Kota Denpasar disusun dan ditetapkan untuk memfokuskan peningkatan peran dari Inspektorat dalam menghadapi tantangan Pemberantasan Korupsi. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Denpasar setiap tahun akan dievaluasi sebagai dasar penyusunan Renja tahun berikutnya, sehingga hasil pencapaian dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tiap tahunnya.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2024 ini dilaksanakan konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kabupaten Kota Denpasar untuk mampu meningkatkan kinerja dari proses yang merupakan *output* pengawasan dan sebagai dokumen Rencana Aksi yang memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Walikota serta mendukung arahan prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Inspektur Kota Denpasar



**Ir. Putu Naning Djyaningsih, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.19650726 199201 2 001**

